

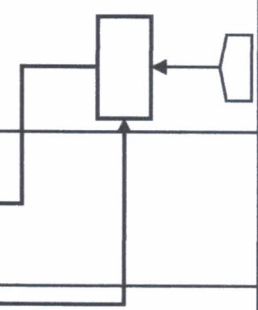
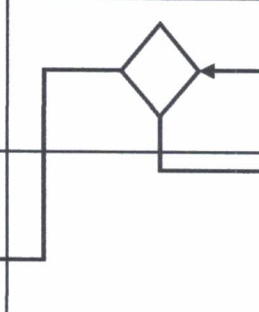
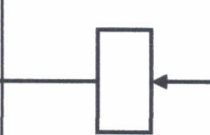


INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

		NOMOR SOP : 11/IJ-IND.1/SOP/2023	
		TGL. PEMBUATAN : 11 Agustus 2023	
		TGL. REVISI :	
		TGL. EFEKTIF : 18 Agustus 2023	
		DISAHKAN OLEH : Sekretaris Inspektorat Jenderal  Wawas Swathatafriah NIP. 196408071991101001	
NAMA SOP : PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) : KONTRAKTUAL			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi	
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian			
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Penerbitan Kartu Pengawasan Kontrak		1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Keterlambatan pembayaran tagihan kontrak dapat mempengaruhi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada kriteria penyelesaian tagihan		1. Dokumentasi disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual/order	

SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) KONTRAKTUAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Penanggung Jawab Kegiatan	Staf PPK	PPK	Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM)	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyerahkan tagihan penyelesaian kontrak pekerjaan					- Tagihan pihak ketiga - Berita Acara Serah Terima (BAST) - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Ringkasan kontrak - Surat Setoran Pajak (SSP) - Faktur Pajak	15 menit	- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak	- Persetujuan kontrak telah diserahkan oleh KPPN - Penerbitan Karwas Kontrak mengacu
2	Mencetak Kartu Pengawasan (Karwas) Kontrak yang telah disetujui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak	15 menit	- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Kartu Pengawasan (Karwas) Kontrak	- Penerbitan Karwas Kontrak mengacu
3	Memverifikasi Karwas Kontrak dan tagihan penyelesaian kontrak pekerjaan serta menugaskan staf PPK untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Karwas Kontrak	30 menit	- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Karwas Kontrak	

4	Membuat SPP			- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Karwas Kontrak	30 menit	- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Karwas Kontrak - SPP	
5	Menandatangani SPP			- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Karwas Kontrak - SPP	30 menit	- Tagihan pihak ketiga - BAST - BAP - Ringkasan kontrak - SSP - Faktur Pajak - Karwas Kontrak - SPP	
6	Mencetak dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)			- Tagihan pihak ketiga - Ringkasan kontrak - Karwas Kontrak - Faktur Pajak - SSP - SPP	30 menit	- Tagihan pihak ketiga - Ringkasan kontrak - Karwas Kontrak - Faktur Pajak - SSP - SPP - SPM	
7	Mengirimkan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)			- Karwas Kontrak - SPM - SSP	15 menit	- SP2D	KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
TOTAL WAKTU					2 jam 45 menit		